

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Sedangkan, Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada Al- Quran dan Hadits.²

Bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit of fund*). Dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah mengandung prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*). Bentuk *ta'awun* tersebut adalah dengan adanya pembiayaan yang di sediakan bank syari'ah bagi nasabah, salah satunya adalah adanya pembiayaan mikro bagi nasabah yang ingin mengembangkan usaha kecilnya.

Jenis pembiayaan tersebut di BRI Syariah disebut dengan unit mikro BRISyariah iB. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk kebutuhan modal kerja atau investasi dan hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia asli. Produk pembiayaan ini menggunakan akad jual beli *al-murabahah*, *ba'i al-murabahah*

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

adalah jual beli barang pada harga asal dengan tabahan keuntungan yang di sepakati.³

Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.⁴

BRI Syariah KCP Majalaya, menyediakan pembiayaan *take over* pembiayaan mikro, yaitu mengalihkan transaksi non syariah yang sudah berjalan di bank konvensional ke transaksi syariah. Istilah *take over* dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan atau akuisisi.⁵ Dalam kamus bahasa inggris-indonesia berarti mengambil alih⁶. Sedangkan menurut Ahmad Antoni K Muda, *take over* adalah pengambil alihan atau dalam lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan.⁷

Take over pembiayaan mikro bertujuan untuk mengajak meninggalkan LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) yang bersifat darurat yang akan digunakan untuk meningkatkan usaha nasabah dalam pembelian barang modal kerja nasabah atau untuk investasi nasabah.⁸

³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, ...hlm. 103

⁵ Damos O.Y. Sihombing, *Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi-2, (Jakarta : Erlangga, 1994), hlm .637.

⁶ John M Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama1990)., hlm. 578

⁷ Ahmad Antoni K Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta Gramedia Press, 2003), hlm. 331

⁸ *Pedoman Pembiayaan Mikro PT Bank BRI Syariah*, BAB IV Ketentuan Pembiayaan *take over*, versi 01. hlm. 1

Transaksi pengalihan utang (*take over*) menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 mengatur tentang pengalihan hutang. Dalam fatwa tersebut terdapat 4 alternatif yang dapat dipergunakan bank syariah dalam pelaksanaan pembiayaan *take over*, yaitu:

1. Alternatif pertama (*Qardh Bai' wal Murabahah*)
2. Alternatif kedua (*Syirkah al-milk wal Murabahah*)
3. Alternatif ketiga (*Qardh wal Ijarah*)
4. Alternatif keempat (*Qardh wal Ijarah Muntahiya bit-Tamlik*)

Nasabah X memiliki utang kepada Bank Konvensional Y dan nasabah tersebut berkeinginan untuk mengalihkan utangnya kepada Bank BRI Syariah KCP Majalaya. Untuk merealisasikannya, maka nasabah dan bank sepakat untuk melakukan *take over* pembiayaan mikro ditambah pembiayaan modal kerja. *Take over* pembiayaan mikro tersebut menggunakan alternatif yang pertama dengan konsep akad *qardh Bai' wal Murabahah*.

Penggunaan akad *Qardh dan Bai' wal Murabahah* apabila dipraktekkan dapat menimbulkan *bai' al-'inah*. *Bai al-'inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh (*deferred payment sale*).⁹ Dapat disimpulkan jual beli ini sesungguhnya bertujuan untuk menginginkan pinjaman (uang), bukan menginginkan barang.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 185.

Menurut ulama Malaysia jual beli dengan akad *bai' al-'inah* dibolehkan, namun ulama Timur Tengah dan Indonesia berpendapat bahwa *bai' al-'inah* tidak boleh.¹⁰

Dari permasalahan di atas untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dalam tugas akhir yang berjudul : **"UNSUR *BAI' AL-'INAH* DALAM PELAKSANAAN *TAKE OVER* DI BRI SYARIAH KCP MAJALAYA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa akad *qardh bai' wal murabahah* pembiayaan *take over* yang diterapkan di BRI Syariah KCP Majalaya apabila dipraktekkan dapat menimbulkan *bai' al-'inah* yang secara hukum ekonomi syariah dilarang.

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan mekanisme *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majalaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah (*fiqh muamalah*) tentang pengalihan utang (*take over*) pembiayaan mikro yang dilaksanakan di BRI Syariah KCP Majalaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* , ...hlm. 186

1. Mengetahui proses dan mekanisme *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majalaya;
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah (*fiqih muamalah*) tentang pengalihan utang (*take over*) pembiayaan mikro yang dilaksanakan di BRI Syariah KCP Majalaya.

Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

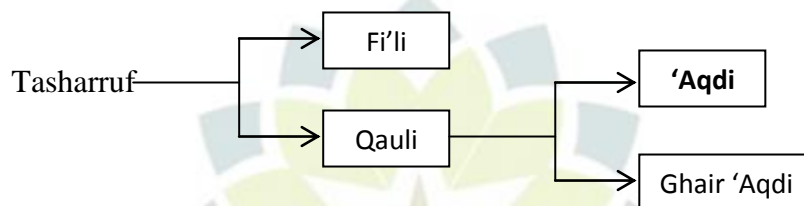
- a. Hasil penelitian dan penulisan ini akan sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya, serta bagaimana penerapan teori-teori di dalam praktek perusahaan khususnya di Bank-bank Syariah, sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kegiatan muamalah. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan Bank Syariah. Khususnya terkait dengan pembiayaan *take over*.

D. Kerangka Pemikiran

'*Aqad* adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang artinya adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya. *Tasharruf* terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. *Tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharruf qauli* terbagi menjadi

dua yaitu *'aqdi* dan *ghair 'aqdi*, dan yang dimaksud dengan *'aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian.¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan *ghair 'aqdi* ada dua macam yaitu merupakan pernyataan dan mewujudkan tuntutan-tuntutan hak.¹² Dari paparan di atas dapat digambarkan skema asal-usul *'aqad*, yaitu;



Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam.¹³ Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-‘Aqd*, bentuk masdar adalah kata *‘Aqada* dan jamaknya adalah *al-‘Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.¹⁴ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa kata *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).¹⁵

Adapun pengertian menurut istilah, disini ada beberapa pendapat diantaranya adalah *Wahbah Zuhaili* dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh *Dimyauddin Djuwaini* bahwa akad adalah hubungan atau

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 43.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 44.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 1, hlm. 63.

keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹⁶

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:¹⁷

1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)
3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
4. Tujuan akad

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya."¹⁸ (QS. Al-Maidah: 1)

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*ribhun*) dan transaksi tidak mencari keuntungan (*tabarru*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contract/ NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural*

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

¹⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 34.

¹⁸ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, (Jakarta: Departemen Agama RI., 1978), hlm. 156.

uncertainty contract/ NUC), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan untuk pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial.¹⁹

Saat ini, dalam dunia industri modern, pembagian tenaga kerja dan spesialisasi telah mencapai tingkat efisiensi di mana bisnis (perdagangan) tidak dapat berlangsung walau sehari tanpa pertukaran. Akan lebih tepat dan benar jika kita mengatakan bahwa pertukaran penting bagi semua kegiatan-kegiatan ekonomi selanjutnya.²⁰ Teori pertukaran terdiri dari dua pilar, yaitu:²¹

a. Objek Pertukaran

Fiqh membedakan dua jenis objek pertukaran, yaitu :

1. *'Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa
2. *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga

b. Waktu Pertukaran

Fiqh membedakan dua waktu pertukaran, yaitu :

1. *Naqdan (Immediate delivery)* yang berarti penyerahan saat itu juga
2. *Ghairu Naqdam (Deferred delivery)* yang berarti penyerahan kemudian

Dari segi objek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu:

1. Pertukaran *real asset ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)*

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, edisi.1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37-38.

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 72.

²¹ Adiwarman. A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 52.

2. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan financial asset (*dayn*)
3. Pertukaran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Teori percampuran terdiri dari dua pilar pula, yaitu :²²

a. Objek Percampuran

Sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqih juga membedakan dua jenis objek percampuran, yaitu :

1. '*Ayn* (*real asset*) berupa barang dan jasa
2. *Dayn* (*financial asset*) berupa uang dan surat berharga

b. Waktu Percampuran

Dari segi waktunya, sebagaimana dalam teori pertukaran fiqih juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu :

1. *Naqdam* (*Immediate delivery*) yakni penyerahan saat itu juga
2. *Ghairu naqdam* (*Deferred delivery*) yakni penyerahan kemudian

Selanjutnya, dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu :

1. Percampuran *real asset* ('*ayn*) dengan *real asset* ('*ayn*)
2. Percampuran *real asset* ('*ayn*) dengan financial asset (*dayn*)
3. Percampuran *financial asset* (*dayn*) dengan financial asset (*dayn*)

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya yang berdasarkan Al-qur'an dan Al-Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada

²² Adiwarman. A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima, ... hlm. 60-61.

dalil yang melarangnya. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
2. Haram selain zatnya (*haram li-ghairihi*)
3. Haram tidak sah (tidak lengkap) akadnya

Haram zatnya dilarang karena objek (barang/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, babi dan sebagainya. Haram selain zatnya dapat diklasifikasikan menjadi:²³

1. Melanggar prinsip “*An Taradin Minkum*”, yaitu tadlis (penipuan)

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party).

2. Melanggar Prinsip “*La Tazhilmuna wa la Tuzhlamun*”

Prinsip yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya:

- a. *Taghrir* (*gharar*);

Taghrir berasal dari bahasa arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya resiko dan ketidakpastian. Dan dalam istilah fiqh Muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa

²³ Adiwarman. A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima,...hlm. 29-32.

akibatnya, atau memasuki kancan resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.²⁴

b. *Ihtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*);

Monopoli atau ihtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan.²⁵

c. *Bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*);

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik.²⁶

d. *Riba*;

Secara etimologis (bahasa), *riba* berarti tambahan (*ziyâdah*) atau berarti tumbuh dan membesar.²⁷ Adapun menurut istilah *syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara'*, atau terlambat menerimanya.

e. *Masyir*

Secara sederhana yang dimaksud dengan *masyir* adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung pihak lain akibat permainan tersebut.²⁸

²⁴ Adiwarman. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), edisi ketiga, hlm. 182

²⁵ H. A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama*, (Jakarta: Gema Insani Press, Tanpa Tahun) , hlm. 56

²⁶ Adiwarman. A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima, ... hlm. 35.

²⁷ Muhammad bin Muhammad AbiSyahbah, *Hulul li Musykilat al-Riba*, (Kairo:Maktabah al-Sunnah,1996/1416), hlm. 40.

²⁸ Adiwarman. A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima, ... hlm. 43.

f. *Risywah*.

Yang dimaksud dengan perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

Penyebab transaksi atau akad yang dilarang oleh syariat Islam yang ketiga adalah karena tidak sah atau lengkap akadnya. Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori *haram li dzatihi* dan *haram li ghairihi* belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram apabila akad atau transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini: ²⁹

a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak ada. Syarat adalah sesuatu yang melengkapi rukun. Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).

b. *Two in one*

Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).

²⁹ Adiwarman. A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima, ... hlm. 46-46.

c. *Ta'alluq*

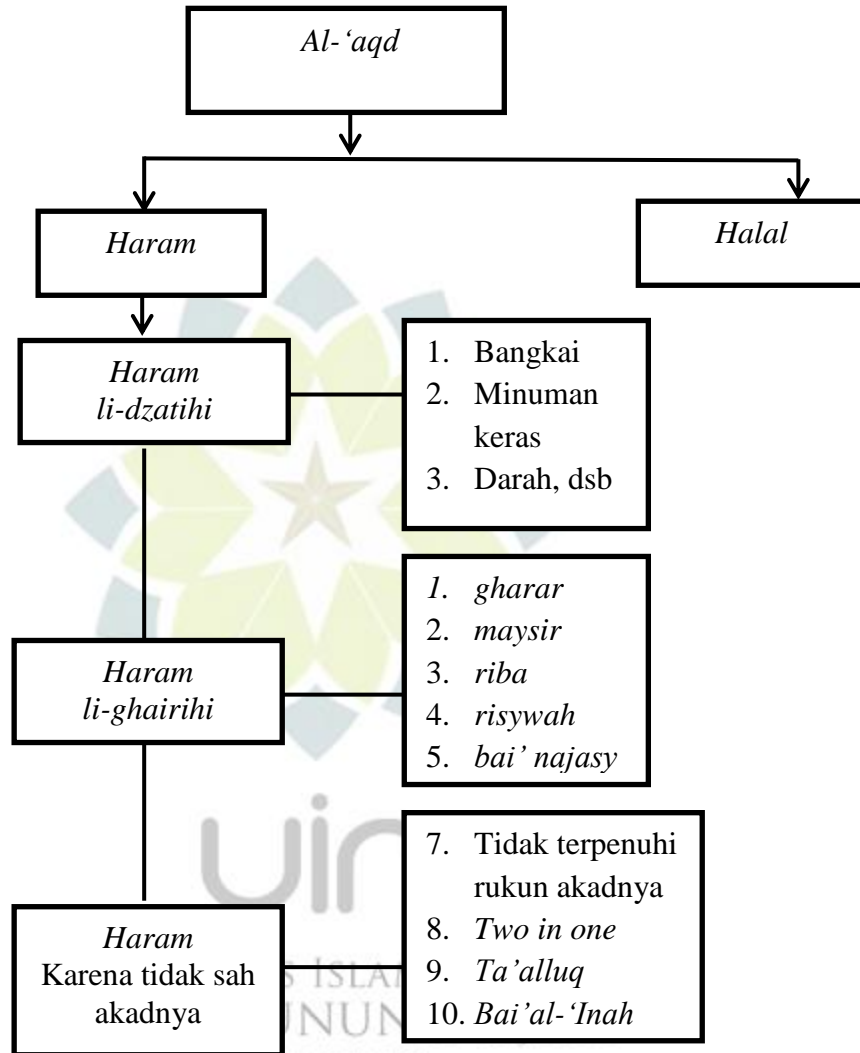
Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contohnya A menjual barang X seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp 100 juta.

Transaksi di atas haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fiqih, kasus di atas disebut *bai' al-'inah*.³⁰



³⁰ Adiwarmarman. A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima, ... hlm. 48.

Gambar 1.1
Kerangka Identifikasi



E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan ditempuh. Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam menyusun laporan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian dimana peneliti menggambarkan dan menganalisis data-data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan diukur melalui penafsiran logis teoritis. Dalam hal ini mengkaji tinjauan *fiqih muamalah* terhadap penerapan pembiayaan *take over* di BRI Syariah KCP Majalaya.

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian ini adalah BRI Syariah KCP Majalaya Jalan Babakan No.91 B Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung . Dengan pertimbangan karena di tempat tersebut terdapat masalah yang dapat dikaji dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

3. Jenis Data

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Data ini memfokuskan pada tinjauan *fiqih muamalah* tentang pembiayaan akad *take over* di BRI Syariah KCP Majalaya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu dokumen berupa kontrak akad , juga data-data yang tidak bersifat rahasia mengenai BRI Syariah juga tentang pembiayaan *take*

over yang didapat dari staf pembiayaan yaitu Bapak Andri atas persetujuan staf kepala mikro syariah Bapak Efendi.

- b. Data sekunder yaitu didapat dari buku-buku yang membahas tentang perbankan syari'ah, muamalah, LKS atau beberapa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian serta artikel-artikel pada media internet tentang penerapan akad *take over*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik:

a. Wawancara

Yaitu tanya jawab peneliti dengan responden. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jawaban tersebut dapat dijadikan data untuk dianalisis dalam kerangka menjawab pertanyaan penelitian. (Heri Jauhari, 2010: 40). Adapun tanya jawab itu sendiri kebanyakan penulis ajukan kepada bagian pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Majalaya yaitu Bapak Andri pada tanggal 25 Januari 2016, diantaranya mengenai nasabahnya, produk-produknya, juga khususnya tentang masalah yang diteliti penulis yaitu pembiayaan *take over*, dan lain sebagainya.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pembiayaan *take over*.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menginventarisir

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber - sumber primer maupun sekunder tentang aplikasi pembiayaan *take over* yang dipraktekkan BRI Syariah KCP Majalaya.

b. Klasifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan.

c. Setelah jenisnya diklasifikasikan, lalu data tersebut dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menarik kesimpulan.

Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka sesuai dengan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam peneliti.